ISSN: 2829-2847

September, Vol. 2, No. 2 (2023)

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN, DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Alya Dwi Pujianti¹, Siti Fatimah², Siti Sriningsih³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Email: alya.dwpujianti@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan merupakan hal yang perlu dilakukan negara agar dapat menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk menikmati lingkungan kehidupan yang sehat dan umur panjang, hidup yang lebih produktif, dan standar hidup yang layak. Pembangunan manusia dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia. Mengukur keberhasilan pembangunan manusia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Melalui tolak ukur ini dapat menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi atau wilayah dalam meningkatkan IPM tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor Kesehatan, dan pendapatan perkapita terhadap IPM secara parsial di Provinsi NTB dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, pendapatan perkapita terhadap IPM secara simultan di Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM sebesar 4.803, sedangkan sektor kesehatan sesebar -0.319 dan pendapatan perkapita sebesar 0.942 tidak berpengaruh terhadap IPM. Secara simultan pengeluaran sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi NTB.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kesehatan, PDRB Perkapita.

1. PENDAHULUAN

Wewenang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola dan mengatur keuangan pemeritah daerah serta dapat dialokasikan dalam penetapan prioritas pembangunan. Dengan adanya otonomi dearah dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam segala aspek dan bersifat menyeluruh. Pembangunan sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara.

Subandi (2012) mendefinisikan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran, yang ditujukan untuk peningkatan

ISSN: 2829-2847

September, Vol. 2, No. 2 (2023)

pendapatan perkapita dalam jangka Panjang. Pembangunan ekonomi dapat didefinsikan sebagai "suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (Income per-kapita) dalam jangka panjang".

Paradigma pembangunan saat ini pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia dengan melihat tingkat kualitas hidup manusia. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan semakin cepat mondorong kemajuan suatu negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasi secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Yang sangat penting yaitu pilihan masyarakat untuk berumur Panjang dan sehat, mendapatkan Pendidikan yang cukup, dan menikmati standar kehidupan yang layak.

Mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Faktor keberhasilan dalam pembangunan yaitu keberhasilan dari pembangunan manusia. Karena sumber daya manusia harus ditingkatkan, sebab tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan sulit untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dari pembangunan ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah akan meningkat saat ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, IPM yang tinggi menandakan suatu keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, dengan kata lain terdapat suatu nilai positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Nilai IPM Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 0,49 yaitu 72,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Provinsi Bali menempati urutan ke-5 tertinggi dengan nilai IPM sebesar 75,69%. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki nilai IPM sebesar 68,65% pada tahun 2021. Jika dikategorikan dalam klasifikasi IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk ke dalam kategori pembangunan manusia menengah. Berikut ini merupakan data IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Table 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB

Tahun	IPM NTB (%)
2012	62.98
2013	63.76
2014	64.31
2015	65.19
2016	65.81
2017	66.58
2018	67.30
2019	68.14
2020	68.25
2021	68.65

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Berdasarkan perolehan Indeks Pembangunan Manusia, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012-2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun masih dikatakan relative rendah dari angka indeks pembangunan manusia nasional. Rendahnya IPM diakibatkan oleh permasalahan pengeluaran pemerintah yang tidak merata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengeluaran pemerintah adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, faktor kebijakan, dan kepentingan publik untuk manusia (BPS, 2021).

Todaro, (2011) mengatakan faktor lainnya yang mempengaruhi IPM adalah kesehatan dan pendidikan dimana ini merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan adalah kesejahteraan, Pendidikan adalah untuk menggapai kehidupan yang berharga dan memuaskan, dan tingkat kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal untuk mengembangangkan IPM yaitu melalui pengeluaran disektor Pendidikan dan Kesehatan.

Pengeluruan untuk sektor Pendidikan tertinggi adalah pada tahun 2021 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp1.977.230.167.268 sedangkan untuk sektor Kesehatan pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp3.556.273.228.143. Apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan pengeluaran baik pada sektor Pendidikan maupun Kesehatan selama sepuluh tahun terakhir dimana pengeluaran pada sektor Pendidikan mengalami rat-rata pertumbuhan sebesar 24% dan pada sektor Kesehatan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5%. Dengan adanya pengeluaran dan melihat rata-rata pertumbuhan dari kedua sektor tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang baik dengan meningkatkan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan IPM NTB tidak hanya dapat dicapai dengan meningkatkan pendidikan dan Kesehatan. Namun dapat juga dicapai melalui pendapatan, yang artinya seseorang yang berpenghasilan lebih tinggi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan primer mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi untuk memenuhi kebutuhan lain seperti Kesehatan dan Pendidikan. Pendapatan yang

ISSN: 2829-2847

September, Vol. 2, No. 2 (2023)

dimaksud yaitu pendapatan perkapita tingkat pendapatan rata-rata suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduknya.

Data PDRB Perkapita NTB mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimana itu terlihat pada tahun 2021 total pendapatan perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya sebesar Rp 17.706,29 hal ini menunjukkan pendapatan perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat menurun, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 19.305,79 ini merupakan pendapatan perkapita tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama sepuluh tahun. Namun pendapatan perkapita 2021 masih terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Tentunya dengan pendapatan perkapita tersebut dapat memenuhi kebutuhuan masyarakat yang akan berdampak pada IPM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran dengan melakukan perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, Pendidikan dan standar hidup. Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia, dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (Kesehatan dan kesejahteraan) maupun dari sisi non-fisik (Pendidikan).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah pada sektor Pendidikan termasuk kedalam pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pada sektor pembangunan dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar asasi manusia, maka pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan, perlindungan dan memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan cara untuk memenuhi hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan.

Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua nilai seluruh total barang dan jasa yang dibuat dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi membutuhkan keberadaan faktor produksi yang digunakan saat proses produksi, PRDB menjadi salah satu acuan dalam kemajuan teknologi suatu daerah. Pendapatan per kapita banyak digunakan sebagai ukuran tingkat kemakmuran dan pembangunan suatu negara.

ISSN: 2829-2847

September, Vol. 2, No. 2 (2023)

Teori Pengeluaran Pemerintah

Adolf Wagner (Prasetya 2012) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan aktivitas pemerintah telah meningkat dari waktu ke waktu. Tren ini, yang disebut Wagner sebagai hukum, semakin memperkuat peran pemerintah. Inti dari teori tersebut adalah meningkatnya peran negara dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, ketika pendapatan per kapita meningkat, begitu pula pengeluaran pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Dimana deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan pengaruh pengeluaran pemerintah, dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara, sedangkan kuantitatif digunakan karena pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, dan indeks pembangunan manusia dijelaskan dengan angka.

Analisis Data

Penelitan ini menggunakan metode analisis linear regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan untuk uji data dalam penelitian ini menggunakan yaitu:

1. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari:

Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskesdatisitas, dan Uji Multikorelasi

2. Uji Hipotesis yang terdiri dari:

Uji T (Parsial), Uji F (Simultan), Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar P-P plot menunjukkan bahwa hasil yang didapat dari uji normalitas dalam penelitian ini berdistribusi normal karena titik-titik mengikuti garis diagonal.

2. Hasil Uji Multikorelasi

Berdasarkan hasil uji multikorelasi di semua variabel independent menunjukkan tidak adanya gangguan multikolinieritas. Dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10. Artinya semua variabel dapat digunakan.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi dapat dilihat hasilnya menunjukkan bahwa dL lebih kecil dari dW, dW lebih kecil dari dU dengan nilai 0.525 < 1.568 < 2.016, maka artinya tidak dapat ditarik kesimpulan.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar scatterplott menunjukkan bahwa titik-titik berada diatas dan dibawah atau dapat dikatakan bahwa penyebaran titik-titik tidak berpola. maka dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda

Mode	Model Unstandardized Coefficients		
		В	Std. Error
1	(Constant)	3.297	.679
	PENDIDIKAN	.015	.003
	KESEHATAN	003	.010
	PDRB PERKAPITA	.041	.043

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan uji regresi linear berganda pada table 4.7 diketahui konstant (α) sebesar 3.297, sedangkan nilai X1 sebesar 0.015, nilai X2 sebesar -0.003, nilai X3 sebesar 0.041 (b/koefisien regresi).

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji T (Parsial)

Tabel 4.2 Hasil Uji T Parsial

Model		Т	Sig.
1	(Constant)	4.856	.003
	PENDIDIKAN	4.803	.003
	KESEHATAN	319	.760
	PDRB PERKAPITA	.942	.383

Sumber: Output SPSS

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1)

Diketahui nilai Sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0.003 < 0.05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 4.803 > 2.446, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti X_1 berpengaruh positif terhadap Y.

2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2)

Diketahui nilai Sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0.760 > 0.05 dan nilai t_{hitung}

< t_{tabel} sebesar (-0.319) < 2.446, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

3. Variabel Pendapatan Perkapita (X3)

Diketahui nilai Sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,383 > 0,05 dan nilai t_{hitung} < t_{tabel} sebesar 0.942 < 2.446, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 4.3 Tabel Uji F Parsial

Model		F	Sig.
1	Regression	23.703	.001 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui nilai signifikan untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pendapatan perkapita secara simultan terhadap variabel IPM adalah sebesar 0,001 > 0,05, sedangkan nilai f_{hitung} > f_{tabel} sebesar 23.703 > 4.35, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji diterima yang berarti X1, X2, dan X3 berpengaruh positif secara simultan terhadap Y.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 4.4 Uji Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R
1			Square
1	.960ª	.922	.883

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Adjusted R Square (R²) menunjukkan hasil nilai sebesar 0.883, hal ini menggandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 88.3%, dan sisanya sebesar 11.7% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB. Sedangkan pengelaran pemerintah sektor Pendidikan secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB. Hal ini sesuai dengan hipotesis secara parsial maupun simultan yang mengatakan variabel pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh terhadap IPM.

ISSN: 2829-2847

September, Vol. 2, No. 2 (2023)

Pengeluaran pemerintah pada sektor Pendidikan mempengaruhi perkembangan di bidang Pendidikan dengan meningkatkan jumlah siswa yang mampu menyelesaikan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dapat dilihat selama sepuluh tahun terakhir pengeluaran pemerintah NTB pada sektor Pendidikan meningkat per tahunnya, setelah melalui uji satistik pengeluaran tersebut berdampak secara langsung untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di NTB selama sepuluh tahun terakhir.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian terdahulu yang dilakukan Arifin Baqtiar, Murjani Ahmadi (2017) bahwa pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan secara simultan memilik pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB. Hal ini sesuai dengan hipotesis secara simultan yang mengatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB.

Dapat dilihat selama sepuluh tahun terakhir pengeluaran pemerintah NTB pada sektor Kesehatan mengalami fluktuasi per tahunnya. Kesehatan adalah indikator dampak, yang hasilnya akan dirasakan tidak dengan instan. Kebijakan kesehatan yang dibangun saat ini belum tentu akan langsung dirasakan hasilnya tahun depan. Oleh sebab itu pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan belum berdampak secara langsung terhadap IPM.

Hasil penelitian ini dejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astri M, Nikensari Indah S, Kuncara H (2013) bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara parsial tidek berpengaruh terhadap IPM, sedangkan secara simultan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap IPM.

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pendapatan Perkapita secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB. Sedangkan Pendapatan Perkapita secara simultan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB. Hal ini sesuai dengan hipotesis secara simultan yang mengatakan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model sederhana dalam bentuk Logaritma natural bahwa pendapatan perkapita belum memberikan dampak secara langsung, karena pendapatan masyarakat relatif rendah kondisi ini mengakibatkan pengeluaran Pendidikan

ISSN: 2829-2847

September, Vol. 2, No. 2 (2023)

dan Kesehatan relatif terbatas karena alokasi konsumsi yang lebih besar untuk kebutuhan dasar. Artinya saat pertumbuhan ekonomi rendah menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan, merubah pola konsumsi dalam hal tingkat daya beli masyarakat semakin berkurang.

Rendahnya daya beli masyarakat mengakibatkan kualitas sumber daya manusia dianggap kurang penting dan terabaikan. Dalam hal ini tidak dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia karena salah satu indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi maka tidak dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2012) bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap IPM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB, dan pendapatan perkapita secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB.
- 2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB.
- 3. Hasil dari analisis koefisien adjusted R² menunjukkan nilai sebesar 88,3 persen dipengaruhi dari variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan, dan pendapatan perkapita. Dan sisanya 11,7 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Penggunanan belanja Pendidikan dan Kesehatan disesuaikan dengan target yang ingin dicapai pemerintah.

2. Bagi peneliti berikutnya, dengan adanya hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan baik acuan referensi maupun perbandingan hasil penelitian dalam melakukan penelitian, karena penelitian masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam penulisan skripsi maupun dari isi skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Mahendra. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating di Indonesia.
- Abdul hakim. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. EKONISIA
- Adim, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendataan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Arifin B, M. D. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- Astri M, Indah, N. S. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia
- Badan Pusat Statistik. (2021). Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2021).
- Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2021).
- Dumairy. (2006). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Elbadriati, B., Gemilang, S. G., & Handalucia, V. (2022). Testing The Religiosity Level As A Moderating Variable Towards The Productivity Level And The Economic Independence Of Women Songket Weavers. Ulul Albab, 23(2), 347.
- Fadliyanti, L. P., Pudjihardjo, M., Yustika, A. E., & Pratomo, D. S. (2013). Analysis Female Migrant Workes (TKW) Decision Migrate to Saudi Arabia. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(17), 5-11.
- Hassan, A., Maharoff, M., Abiddin, N. Z., & Ro'is, I. (2015). Teacher trainers' and trainee teachers' understanding towards the curriculum philosophy regarding soft skills embedment in the Malaysian Institute of Teacher Education. Policy Futures in Education, 14(2), 164-175.
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The influence of human resources, use of information technology and public participation to the transparancy and accountability of village financial management. International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), 6(05).
- Maryam, S. T., Atamimi, R., Sumartono, E., Orbaningsih, D., & Riinawati, R. (2020). Global financial crisis management by human resource management. Journal of Critical

ISSN: 2829-2847

September, Vol. 2, No. 2 (2023)

Reviews, 7(1), 287-290.

- Mudrajad Kuncoro, (2013). Mudah Memahami dan Mengalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- M Sanggelorang, S. M. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.
- Prasetya. (2012). Teori Pengeluaran Pemerintah.
- Ramadani, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- Sadakah, S., Chairunnisah, R., Andriani, H., Permana, Y. R., Hasanah, U., Qudsi, J., ... & Firmansyah, M. (2021). Hubungan Karakteristik Individu dengan Kinerja Petugas Rekam Medis pada Rumah Sakit Swasta di Kota Mataram. Jurnal Kesehatan Vokasional, 5(4), 208-216.